

TINGKAT KAPABILITAS APIP

Dari 542 APIP Prov/Kab/kota yang sudah diassessment adalah 417 sisanya 125 belum dilakukan assessment (4 Prov dan 121 Kab/Kot)

INFRASTRUCTURE :

APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi

Level 1

INITIAL :

APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi

Level 1 : 367 APIP Daerah (24 APIP Provinsi, 275 APIP Kabupaten dan 68 APIP Kota)

INTEGRATED :

APIP mampu menilai 3E suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian Intern

Level 3

Level 2 : 50 APIP Daerah (6 APIP Provinsi : BABEL, DKI JKT, JABAR, YOGYA, KALTIM DAN GORONTALO, 31 APIP Kabupaten dan 13 APIP Kota)

MANAGED :

APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

Level 4

OPTIMIZING :

APIP menjadi agen perubahan

Level 5

Sumber data



KELEMBAGAAN

KONDISI SAAT INI

1. a. Ketidakpastian kewenangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
b. Nomenklatur pada umumnya masih by locus
2. Independensi terbatas

PENYEBAB / PERMASALAHAN

1. Kontradiksi antara PP79/2005 dengan PP60/2008
2. Kesamaan Eselonering dengan Entitas yang diperiksa

SUMBER DAYA MANUSIA

KONDISI SAAT INI

1. Mutu hasil pemeriksaan sebagian masih relatif rendah
2. Tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara jabatan fungsional dan struktural

PENYEBAB / PERMASALAHAN

1. Kompetensi dan formasi jabatan fungsional belum memadai
2. Pola tata hubungan kerja antara fungsional dan struktural belum jelas

BISNIS PROSES

KONDISI SAAT INI

1. Belum melaksanakan pedoman-pedoman yang ada secara konsisten
2. Hasil pengawasan belum efektif menjadi bahan pengambilan keputusan
3. Sulit memisahkan ruang lingkup pelaksanaan pengawasan antara Auditor dengan P2UPD

PENYEBAB / PERMASALAHAN

1. Reviu berjenjang belum optimal
2. Belum adanya aturan mengenai sanksi atas tidak ditindaklanjutinya hasil pengawasan APiP
3. Belum adanya aturan yang menjembatani pelaksanaan tugas auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah)

INFRASTRUKTUR

KONDISI SAAT INI

1. Pelaksanaan dan hasil pengawasan belum sepenuhnya memenuhi standar
2. Pelaksanaan pengawasan belum efektif dan efisien
3. Penghargaan terhadap jabatan fungsional belum memadai

PENYEBAB / PERMASALAHAN

1. Pedoman-pedoman yang ada belum memadai
2. Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Ketidaksetaraan antara jabatan fungsional dan struktural

USULAN/ GAGASAN

1. Kepastian hukum yang melandasi pelaksanaan tugas APIP

2. Penguatan Kelembagaan APIP

3. Sinergitas pembinaan dan pengawasan APIP secara nasional

4. Percepatan penetapan RUU SPIP menjadi UU dan sekaligus dipersiapkan PP serta Peraturan Inspektur Nasional

5. Perlu adanya Blueprint Pengawasan

**TERIMA
KASIH**



PAPARAN KAPABILITAS APIP

Oleh :
INSPEKTUR PROVINSI JAWA BARAT

H. PERY SOEPARMAN,SH.,MM.,M.Si